TEROPONG

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Trotoar Transjakarta

JAKARTA, TEROPONG - PARA pengamat mendesak aparat Kejaksaan mengungkap seluruh kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta secara transparan. Salah satunya kasus pemeliharaan trotoar di jalur Transjakarta yang diduga kuat melabrak aturan pedoman pelaksanaan barang dan jasa dalam penetapan Pemenang lelang proyek. "Sebenarnya kasus itu sudah menjadi rahasia umum. Heran juga mengapa Inspektorat dan Kejaksaan susah mengungkapkannya", ujar M.Sitanggang Ketua LSM 'SISIR' DKI Jakarta.

M.Sitanggang mengaku, kasus proyek pemeliharaan yang digarap Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut pernah menjadi konsumsi publik pada 2013. Apalagi perusahaan Pemenang tender PT.LRR yang ditetapkan Dinas PU menggarap pekerjaan paket 1 di koridor 1 sampai 3, ternyata perusahaan daftar hitam (*blacklist*). "Makanya, kita minta ketegasan dari Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini. Kalau memang *blacklist* kan bisa dicek melalui lembaga pengadaan barang dan jasa", saran M. Sitanggang.

M.Sitanggang melihat, selama ini aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan kurang transparan mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bukan hanya kasus di Dinas PU yang susah, beberapa pejabat yang pernah diperiksa Kejaksaan juga hingga kini belum ada keputusan atas statusnya. Seperti mantan pejabat DKI Jakarta lainnya sampai sekarang kabarnya hilang ditelan bumi. "Bukannya saya membela KPK ya, tapi paling tidak pengungkapan kasus oleh Kejaksaan seperti KPK. Misalnya, masyarakat langsung melakukan inventarisasi mengumpulkan bukti-bukti", lanjutnya.

M.Sitanggang menyatakan, hingga kini juga ada sejumlah PNS Pemprov DKI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, namun tetap kini menjadi pejabat. Sayangnya, karena tidak ada publikasi, PNS tersebut justru dilantik menjadi pejabat, beberapa waktu lalu. "Azas trasparansi dan professional dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta belum dijunjung tinggi", sindirnya.

Lanjut M.Sitanggang, salah satu cara mengumumkan ke publik terkait perkembangan kasus adalah melalui media massa. "Jangan sampai publik menuding Kejaksaan sengaja tidak transparan agar bisa mempermainkan hkum", ujarnya.

Pejabat DKI yang disebut M.Sitanggang itu, tersandung kasus korupsi di Kejati. Oknum pejabat tersebut sudah ditetapkan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat panggilan tersangka SP 1165/o.1,5/Fd.1/08/2010. Pejabat terduga tersangka korupsi itu, saat dia sebagai Kepala Bagian Pengadaan dan Penyimpangan BPKD DKI. Ia diduga, terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi/manipulasi/penyelewengan dalam Pengadaan jasa penagihan kewajiban pengembang Rumah Susun Sederhana kebutuhan Pemprov DKI tahun 2007. "Dugaan kasus korupsi lainnya terjadi di BPKD DKI. Dua mantan Kepala BPKD diketahui sudah bolak balik diperiksa, namun hingga statusnya masih mengambang", lanjutnya.

Sebelumnya, mantan Kepala bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU DKI Juaini Yusuf mengklaim, bahwa pelaksanaan proyek Pemeliharaan Trotoar 2013 sudah sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Bahkan, karena keterbatasan waktu pekerjaan, pihaknya tidak membayar hingga 100 persen. ***(tim)***